

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Jepara

Halaman 13

Bupati Jepara Minta Ijin DPRD Ajukan Utang ke Bank Jateng

Untuk Biayai Pembangunan



JEPARA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Jepara, Bupati Jepara mengajukan ijin untuk bisa mengambil pinjaman guna membiayai pembangunan. Secara resmi permohonan ijin ini disampaikan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara, Selasa (2/10) di Gedung DPRD Jepara. Ahmad Marzuqi meminta ijin untuk bisa mengajukan pinjaman sebesar Rp100 Miliar ke Bank Jawa Tengah.

Pinjaman yang direncanakan berdurasi 3 tahun masa pengembalian ini diarahkan untuk pembangunan Pasar Bangsri Baru sebesar Rp 55.700.000.000 dan pembangunan prasarana jalan dengan alokasi sebesar Rp 44.300.000.000. Selanjutnya, jika disetujui pinjaman ini akan diangsur

sepanjang 3 tahun mulai tahun 2020 sampai 2022, seiring masa jabatan Ahmad Marzuqi berakhir. Skemanya, setiap triwulan mulai Januari 2020 akan membayar angsuran pokok sebesar Rp11.111.111.111 dengan bunga yang terus berakumulasi hingga triwulan pertama tahun 2022.

Permohonan ijin ini langsung mendapatkan respon beragam dari para anggota DPRD Jepara. Anggota dari PKS, A Rofiq pada kesempatan pertama langsung menyatakan keberatannya. Pengajuan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Jepara. Rofiq dalam kesempatan itu mempertanyakan apakah memang hal ini menyangkut kebutuhan yang mendesak, hingga harus melakukan pinjaman.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kenapa pinjaman itu sebagian besar diperuntukkan untuk masyarakat Bangsri saja. Selain itu, pada awalnya Pemkab Jepara hanya mengajukan pinjaman sekitar Rp 55 Miliar. Namun secara tiba-tiba

jumlah itu berubah menjadi Rp100 Miliar. Pihaknya khawatir hal ini bisa memberi beban berat bagi APBD Jepara pada tiga tahun mendatang, dimana pinjaman tersebut harus dikembalikan berikut bunganya.

"Untuk rencana membangun Pasar Bangsri saya sangat setuju. Namun soal pembiayaannya yang saya tidak setuju. Saya khawatir hal ini akan menjadi kebiasaan baru bagi Pemkab Jepara," ujar A Rofiq.

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jepara Purwanto ini, Bupati Jepara Ahmad memberikan penjelasan mengenai rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini mengalami keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiayai seluruh prioritas pembangunan daerah. Karenanya perlu kreatifitas daerah guna membiayai pembangunan tersebut, termasuk dalam bentuk pinjaman daerah.

Selanjutnya, dengan skema yang sudah direncanakan, dalam pinjaman ini Pemkab Jepara hanya akan membayar bunga sebesar kurang lebih

Rp13 Miliar. Dengan pembiayaan ini juga diharapkan bisa segera memberikan prasarana yang lengkap untuk kepentingan Pasar Bangsri. Hal ini tidak akan bisa dicapai jika menggunakan model multi years. Soal kenapa harus ke Bank Jateng, Marzuqi menyebut bahwa Bank Jateng sahamnya juga sebagian menjadi milik Pemkab Jepara, sehingga jika ada keuntungan Pemkab Jepara juga akan mendapatkan bagiannya.

"Berdasarkan perhitungan dan analisa pembiayaan pembangunan tahun 2019, perlu dilakukan pinjaman daerah. Karena itu kami mengajukan persetujuan pinjaman ke DPRD Jepara," ujar Ahmad Marzuqi.

Akan Dibahas

Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Jepara, Purwanto akhirnya menyatakan pengajuan permohonan persetujuan mengenai pinjaman daerah ini akan dibahas lebih dahulu. DPRD Jepara akhirnya membentuk Panitia Khusus yang akan membahas masalah ini. Apakah akan disetujui atau tidak, Pansus akan membahas lebih

dulu dengan berbagai kajian yang dibutuhkan.

Sementara itu dalam Rapat Paripurna berikutnya, Eksekutif Pemkab Jepara dan DPRD Kabupaten Jepara menyepakati pembentukan tiga belas peraturan daerah (Perda) sepanjang tahun 2019. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jepara, melaluinya bicarannya, Budiyati

mengatakan, telah dilakukan pembahasan terhadap usulan bupati tentang pembentukan peraturan daerah. Dalam pembahasan tersebut, usulan bupati disetujui. Selanjutnya dalam Rapat Paripurna, usulan ini juga disetujui oleh seluruh anggota DPRD Jepara.

Setelah adanya persetujuan DPRD Jepara, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi

menyebutkan ada 13 ranperda yang akan dibahas sepanjang tahun 2019. Sebanyak 7 Ranperda merupakan usulan yang sudah disampaikan pada tahun 2018 ini. Sisanya merupakan usulan baru dari beberapa SKPD. Jumlah ini juga bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. ■

Adv-dis